

TAJUK RENCANA

Ada Apa dengan IKN

KEJUTAN menjelang Ibu Kota Nusantara (IKN) digunakan untuk peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengundurkan diri berikut wakilnya Donny Rahajoe. Mengapa mundur? Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Bambang Susantono, akan tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk pengganti dengan kedudukan sebagai pelaksana tugas atau Plt. Istana selanjutnya secara resmi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Plt diminta untuk mempercepat pembangunan yang sedang berjalan.

Maka wajar muncul berbagai kalkulasi pengunduran diri tersebut, dalam hal ini Mensesneg Pratikno juga tidak membeberkan alasan pengunduran diri Bambang Susantono. Namun, Mensesneg menyebut permohonan lebih dulu diajukan oleh Donny Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Masalah IKN memang menjadi polemik hingga sekarang. Bukan hanya lokasinya yang cukup jauh untuk menuju kesana, namun dana yang dikeluarkan pemerintah juga banyak.

Untuk Pembangunan IKN, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71,8 triliun (4,6 miliar dolar AS) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama kurun 2022-2024. Dana untuk pusat pemerintahan Indonesia pada masa depan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya, realisasi anggaran tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun atau ekuivalen 349 juta dolar AS. Pada 2023 sudah mencapai angka Rp 27 triliun atau setara 1,7 miliar dolar AS. Dalam dua bulan pertama tahun 2024 ini realisasi anggaran per 29 Februari 2024 mencapai 146 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,3 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam tahun ini Pemerintah mengalokasikan

anggaran sebesar Rp 39,3 triliun atau 2,5 miliar dolar AS.

Anggaran tersebut juga terserap untuk pekerjaan pembangunan menara rumah susun aparatur negara, rumah kementerian, jalan tol, jalan dan jembatan, bandara VVIP, Bendungan Sepaku Semoi, sistem pengendalian banjir, dan rehabilitasi lahan. Sisanya sebesar Rp 1,9 triliun (120,6 juta dolar AS) digunakan untuk aspek non-infrastruktur.

Mundurinya kepala otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa memiliki berbagai dampak, terutama tergantung pada alasan di balik mundurnya, stabilitas organisasi, dan kemampuan penggantinya. Kalkulasi yang muncul diantaranya bisa menciptakan ketidakpastian terkait arah dan prioritas pembangunan ibu kota baru.

Jika mundurnya kepala otoritas IKN disebabkan oleh masalah internal, atau ketidakmampuan dalam mengelola proyek, hal ini bisa merusak kepercayaan investor terhadap kelangsungan dan kesuksesan proyek pembangunan ibu kota baru. Hal ini dapat mengurangi minat investor untuk menyuntikkan modal ke proyek-proyek tersebut.

Kepala otoritas IKN juga berperan dalam menjalin dan memelihara hubungan dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra internasional. Mundurnya kepala otoritas bisa mengganggu kerja sama yang sedang berlangsung dan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan yang krusial untuk kesuksesan proyek pembangunan. Namun Istana memastikan tiak akan mengganggu.

Sebab itulah, Pemerintah harus memastikan bahwa transisi kepemimpinan di IKN dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatifnya. Ini termasuk memberikan jaminan dan klarifikasi kepada pemangku kepentingan, memastikan kontinuitas operasional, dan menjaga stabilitas organisasi untuk mendukung kelangsungan pembangunan ibu kota baru. (***)

MEMPERINGATI Hari Lingkungan Hidup 2024 ini mengingatkan kita pada film Suzana yang berjudul Bumi Makin Panas. Sebuah ilustrasi, judul tulisan menggambarkan keadaan planet bumi kita memang nampak tidak sedang baik-baik saja keadaannya. Pemanasan global telah menorehkan capaian suhu tertinggi atau terpanas sepanjang Tahun 2023, di mana keadaan tersebut belum pernah dialami oleh penduduk dunia yang tinggal di beberapa belahan benua kahir-akhir ini. Hal ini berakibat kian menipisnya lapisan es di beberapa wilayah permukaan bumi, termasuk di di Jayawijaya-Papua.

Ini membuktikan bahwa pemanasan global benar-benar terjadi dan melanda serta menimbulkan dampak negatif yang tidak ringan bagi semua makhluk hidup di permukaan bumi. Hal ini telah diprediksi oleh para ilmuwan, walau ada sebagian kecil kelompok atau perorangan yang tidak percaya akan ramalan tersebut. Kenyataannya, dugaan tersebut benar adanya dan telah terjadi dan kita dapat merasakan dan amati dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai akibat dari aktivitas manusia, baik di industri maupun transportasi telah menyebabkan peningkatan suhu harian meningkat jauh lebih tinggi dari prediksi semula yang hanya 10 Celcius, ternyata tercatat telah mencapai 1,50 Celcius. Hal ini berakibat melelehnya beberapa Lapisan es tebal di Kutub atau Antartika dan juga terjadi di daerah paling timur Indonesia-Papua.

Taman Kota

Banyak pemerintah daerah membangun taman-taman kota, tetapi nampaknya belum sepadan dan masih terbatas sebagai usaha untuk meningkatkan tempat-tempat yang kurang terurus dan nampak terbelengkalai serta kurang sedap dipandang mata. Di satu sisi mereka mencoba memanfaatkan tanah-tanah milik Pemkot atau Pemkab yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat warga penduduk sekitar bertemu, bercengkrama atau berolahraga bersama. Pemanfaatan ruang atau tempat terbuka hijau sebenarnya belum seperti konsep sesungguhnya taman kota yang ada di kota-kota besar di dunia. Hadirnya taman-taman kota yang sesungguhnya di sekitar kita adalah dambaan masyarakat, namun kondisi

Suranto Tjiptowibisono

isocio economyi warga yang belum memungkinkan ditambah iterasi tentang pentingnya lingkungan hidup yang berkelanjutan masih terus ditingkatkan. Sebuah konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) yang terus-menerus harus dilakukan dan digalakkan agar kehidupan manusia-manusia unggul penghuni



KR-JOKO SANTOSO

di dalamnya akan menjadi penentu keberhasilannya.

Jepang dan Korea Selatan adalah contoh negara dengan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang minim dan terbatas, namun telah berhasil dikapitalisasi menjadi modal dasar luar biasa dalam membangun *ination buildingi* yang jadi rujukan dan fondasi kokoh untuk kejayaan dan kemakmuran warga bangsanya.

Sumber Daya Manusia Lingkungan hidup yang baik tidak terlepas dari kualitas manusia yang menghuni kawasan alam yang disebut sebagai suatu negara. Bahkan kualitas kemajuan suatu bangsa sejatinya tidak ditentukan atau digambarkan oleh pembangunan gedung-gedung bertingkat yang menjulang yang tinggi, namun justru ditandai hal-hal klasik seperti bagaimana keadaan air, udara dan tanah yang senantiasa tanpa polusi. Mereka merasa nyaman dan terlindungi dari ancaman-ancaman baik berupa psikis dan fisik serta merdeka dalam berpendapat dan bebas bersuara dalam

Pemanasan Global: Bumi Semakin Panas

norma dan kaidah yang berlaku.

Kebebasan berpendapat dan berucap adalah jaminan kebebasan serta hak asasi manusia yang bersifat universal dan berlaku di seantero planet bumi. Namun hal itu sifatnya mengikat pada setiap insan yang mempercayainya. Dalam arti luas kebebasan juga tidak boleh berdampak negatif terhadap kelangsungan makhluk hidup penghuni bumi ini. Itulah sebabnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang tinggal di bumi menjadi kunci penentu bagaimana keadaan bumi, semakin baik bebas dari segala bentuk polusi atau tambah tidak terkendali keadaannya, sehingga keadaan atmosfer bumi semakin panas, seperti saat ini dan mungkin akan tambah parah di kelak kemudian hari. Untuk itu segala bentuk kemajuan teknologi dan capaian manusia di planet bumi harus dipastikan juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan yang sekarang kita temui dan pinjam dari anak cucu.

Semoga dengan bukti nyata akan kondisi lingkungan sekarang ini di mana cuaca ekstrim terjadi di beberapa benua akan kian menyadarkan kita betapa mendesaknya manusia untuk turut serta dalam penyelamatan dan pelestarian alam agar generasi yang akan datang tetap nyaman dan aman menempati Ibu Pertiwi. Hak dan wewenang yang mereka miliki harus dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi rumah kaca, agar kondisi lingkungan dapat menjadi asri untuk di huni bagi semua makhluk hidup di Bumi Pertiwi ini. Insy Allah. (**)

*)**Suranto Tjiptowibisono**, Ketua Dewan Profesor UNS.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. General Manager : H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakil. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Sertipikat Tanah Elektronik

PENDAFTARAN tanah sebagai implementasi dari pasal 19 UUPA adalah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum pemegang hak (subjek hak atas tanah) dan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan mendapatkan bukti hak atas tanah, yaitu sertipikat. Sebagaimana diketahui, bukti kepemilikan tanah yang sah di Indonesia adalah sertipikat tanah konvensional, berbentuk analog, sampai diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik.

Penerapan sertipikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital kementerian menuju institusi berstandar dunia pada tahun 2024. Saat itu layanan pertanahan sudah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik. Sertipikat Elektronik menjamin keamanan data dan dokumen, serta menjamin transparansi proses layanan. Penerapan sertipikat elektronik dilaksanakan secara bertahap pada Kantor Pertanahan.

Sertipikat tanah elektronik adalah sertipikat yang disimpan dalam bentuk digital, yang dapat diakses dan diverifikasi melalui sistem yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adanya sertipikat tanah elektronik diharapkan dapat mempermudah proses peralihan kepemilikan tanah, meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan, dan mengurangi potensi konflik atas kepemilikan tanah.

Sertipikat tanah elektronik merupakan dokumen pertanahan yang dihasilkan secara elektronik dan disimpan dalam sistem komputer. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pengurusan tanah, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

UU Cipta Kerja mengatur perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pertanahan. Bagian kedua UU ini tentang kemudahan berusaha, yang mencakup upaya untuk menyederhanakan proses

Renny Setyawati

administrasi pertanahan dan penggunaan teknologi informasi dalam pertanahan serta mengatur Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIPN) yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan data pertanahan di Indonesia. SIPN adalah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap data pertanahan nasional. Salah satu komponen kunci dari SIPN adalah sertipikat tanah elektronik, yang menggantikan peran sertipikat tanah konvensional atau analog dalam proses administrasi pertanahan. Dengan SIPN, data pertanahan dapat diakses secara online dan real-time oleh pihak yang berwenang, sehingga mengurangi potensi konflik atau ketidakjelasan terkait status lahan. Sertipikat tanah elektronik bagian integral dari SIPN, yang memungkinkan pemilik tanah mempunyai dokumen legal yang sah secara elektronik. Namun pelaksanaan sertipikasi tanah secara digital pasti mempunyai tantangan. Permasalahan yang ditimbulkan, secara internal dan eksternal harus bisa diselesaikan dengan baik, yaitu pemasalahan yang timbul dari internal Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dari masyarakat tentang optimalisasi teknologi informasi pembuatan sertipikat tanah elektronik.

Kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian data atau data yang tidak akurat juga perlu menjadi perhatian. Jika terdapat kesalahan, pihak berwenang dapat melakukan perbaikan dan mengeluarkan edisi baru dari Sistem Informasi Tanah dan Eksplorasi dengan penomoran berikutnya. Proses pembetulan dan perubahan data ini harus diatur dengan jelas dan transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan

atau kesalahan dalam pelaksanaan. Meski ada kekhawatiran terkait risiko peretasan data dan ketidakakuratan data fisik pada sistem ini, namun perubahan ini tetap menjadi langkah maju dalam modernisasi pelayanan pertanahan. Dengan pengembangan teknologi dan kekuatan sistem keamanan, diharapkan Sistem Informasi Tanah dan Eksplorasi dapat menjadi sarana yang aman, andal, dan efisien dalam memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah

Dukungan sarana dan prasarana penunjang proses pembuatan sertipikat tanah elektronik juga harus ditingkatkan. Perlu ada sistem keamanan yang kuat dan terus menerus agar data sertipikat tanah elektronik aman dari kejahatan cyber. Pemerintah harus memastikan bahwa semua data yang terkait sertipikat tanah elektronik dilindungi dengan ketat sesuai peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku. Sistem sertifikat tanah elektronik harus terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan lainnya, seperti database kepemilikan tanah dan transaksi properti. Petugas pertanahan juga perlu mendapat pelatihan dan sertifikasi khusus terkait manajemen, keamanan, dan validasi sertifikat tanah elektronik. (**)

*)**Renny Setyawati**, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Pojok KR

Meski kemarau, BMKG ingatkan potensi hujan tinggi.

- **Harus tetap waspada.**

Kepala dan wakil Otorita IKN mundur.

- **Momentum evaluasi.**

Pj Walikota Yogya janji tuntaskan masalah sampah.

- **Persoalan lama yang tak pernah selesai.**

Berita